BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, isu keberlanjutan telah menjadi salah satu perhatian paling mendesak bagi dunia usaha, investor, regulator, dan masyarakat luas. Perusahaan tidak lagi dinilai semata-mata berdasarkan kinerja keuangannya, melainkan juga dari sejauh mana mereka mampu mengelola aspek lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang bertanggung jawab. Konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola telah muncul sebagai kerangka penilaian non-keuangan yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (Warouw et al., 2024). Pengungkapan ESG kini menjadi instrumen strategis bagi para pemangku kepentingan mulai dari investor institusional, regulator, hingga konsumen dalam mengevaluasi risiko non-keuangan, menilai kualitas manajemen risiko jangka panjang. Seiring meningkatnya tuntutan transparansi di pasar modal global, kualitas dan konsistensi pengungkapan ESG kini menjadi salah satu faktor pembeda yang menentukan reputasi dan daya saing perusahaan di hadapan publik.

Pada dasarnya, dorongan perusahaan untuk mengungkapkan informasi ESG berasal dari dua sumber yang berbeda. Sebagian perusahaan mengungkapkan ESG karena kesadaran dari dalam manajemen itu sendiri mereka percaya bahwa mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola secara serius akan menciptakan nilai bisnis

jangka panjang yang lebih kuat. Perusahaan dengan kesadaran seperti ini cenderung melihat pelaporan ESG bukan sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari strategi bisnis yang membedakan mereka dari pesaing (Rahmaniati & Ekawati, 2024). Di sisi lain, tidak sedikit perusahaan yang baru tergerak mengungkapkan ESG justru karena tekanan dari luar mulai dari tuntutan investor yang semakin selektif, tekanan regulasi pemerintah, hingga sorotan publik dan media terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan operasional bisnis mereka. Kedua dorongan ini sebenarnya sama-sama penting, namun kenyataannya di Indonesia khususnya di sektor manufaktur banyak perusahaan baru mulai bergerak ketika tekanan eksternal sudah datang, bukan atas inisiatif sendiri (Warouw et al., 2024). Kondisi inilah yang menyebabkan tingkat pengungkapan ESG antar perusahaan sangat bervariasi: perusahaan yang benar-benar berkomitmen secara internal cenderung mengungkapkan ESG lebih lengkap dan konsisten, sementara yang sekadar merespons tekanan luar seringkali hanya memenuhi syarat minimum.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara memiliki sektor manufaktur yang memainkan peran sangat strategis. Pada tahun 2024, sektor manufaktur tercatat sebagai sektor dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 4,5%, yang didukung oleh peningkatan produksi dan ekspor produk olahan (Badan Kebijakan Fiskal, 2025). Namun di balik kontribusi ekonominya yang signifikan, industri pengolahan (manufaktur) merupakan kontributor terbesar emisi karbon di Indonesia

dengan jumlah mencapai 340,71 juta ton CO2e, jauh melampaui sektor-sektor lainnya (Pertiwi, 2023). Fakta ini menegaskan bahwa sektor manufaktur memikul tanggung jawab lingkungan yang sangat besar dan perlu segera mengadopsi praktik pelaporan ESG yang lebih berkualitas.

Pada periode pengamatan 2022–2024, praktik pengungkapan ESG di Indonesia didorong oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan pedoman teknis penyusunan Laporan Keberlanjutan dalam SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021. Meskipun regulasi ini mewajibkan penyampaian Laporan Keberlanjutan secara bertahap berlaku menyeluruh pada 2025 pelibatan pihak independen untuk melakukan verifikasi (*assurance*) masih bersifat opsional ("jika ada"). Tatanan pelaporan ini akan mengalami perubahan mendasar dengan rencana pemberlakuan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) yang mengadopsi standar global IFRS S1 dan S2 pada 1 Januari 2027. Pemberlakuan IFRS tersebut menuntut perusahaan mengintegrasikan risiko iklim secara langsung ke dalam arus kas dan proyeksi finansial. Kondisi ini menempatkan sektor manufaktur dengan eksposur risiko fisik dan transisi yang sangat tinggi di bawah tekanan besar untuk menyiapkan infrastruktur data ESG mereka sejak dini. Oleh karena itu, periode 2022–2024 menjadi fase krusial yang menjadi *baseline* kondisi pengungkapan ESG perusahaan manufaktur sebelum regulasi ketat tersebut berlaku.

Meskipun regulasi telah mendorong pengungkapan ESG, kenyataannya masih banyak perusahaan manufaktur di Indonesia yang belum mengungkapkan informasi

ESG mereka secara konsisten dan komprehensif (Ciptani et al., 2025). Rendahnya tingkat pengungkapan ESG ini menciptakan kesenjangan informasi yang menyulitkan pemangku kepentingan dalam menilai risiko lingkungan dan sosial perusahaan. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengakui adanya tantangan berupa kesenjangan antara regulasi dengan implementasi di lapangan, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku pasar modal terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dan keterbatasan sumber daya yang memadai (PT Bursa Efek Indonesia, 2025). Kondisi ini mendorong perlunya kajian mendalam mengenai faktor-faktor tata kelola yang secara nyata memengaruhi tingkat pengungkapan ESG, baik dari sisi mekanisme audit eksternal maupun dari sisi struktur internal perusahaan.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kualitas pengungkapan ESG adalah audit tenure atau masa perikatan audit. Dalam kerangka teori keagenan Jensen & Meckling (1976) auditor eksternal berperan sebagai mekanisme pengawasan yang mereduksi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan. Masa perikatan yang lebih panjang memungkinkan auditor mengakumulasikan pengetahuan mendalam mengenai operasional dan risiko perusahaan. Di satu sisi, hal ini mampu memberikan tekanan lebih substansial kepada manajemen untuk mengungkapkan ESG secara lebih komprehensif; di sisi lain, masa perikatan yang terlalu panjang berpotensi menurunkan independensi auditor akibat kedekatan dengan manajemen Lin (2021). Peran auditor dalam pelaporan ESG ini semakin relevan di tengah transisi standar assurance keberlanjutan menuju ISSA 5000 yang akan berlaku efektif 2027,

menjadikan audit tenure topik yang krusial untuk dikaji pada periode transisi ini. María del Carmen et al. (2024) membuktikan pengaruh positif signifikan audit tenure pada perusahaan internasional, sementara Narullia et al. (2024) dalam konteks Indonesia justru menemukan tidak adanya pengaruh signifikan. Inkonsistensi ini menjadikan audit tenure sebagai variabel yang relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Faktor berikutnya yang turut memengaruhi pengungkapan ESG adalah ukuran perusahaan. Dalam kerangka teori legitimasi (Suchman, 1995), perusahaan berukuran besar menghadapi eksposur publik dan tekanan pengawasan yang lebih intensif dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga terdorong untuk mengungkapkan informasi ESG secara lebih komprehensif sebagai strategi legitimasi. Selain itu, perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya finansial, manusia, dan teknologi yang lebih memadai untuk mendukung implementasi dan pelaporan ESG secara menyeluruh (Rino Wahyudi et al., 2023). Sejumlah penelitian telah membuktikan hubungan positif antara ukuran perusahaan dan kualitas pengungkapan ESG, antara lain Roestanto et al. (2022) dan Nadiyasu et al. (2025). Namun, sebagian penelitian lainnya seperti Kulsum et al. (2025) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak selalu menjamin kualitas pengungkapan yang lebih baik, mengingat adanya variasi dalam komitmen manajemen dan kapasitas tata kelola. Ketidakkonsistenan temuan ini mendorong perlunya pengujian ulang dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia.

Untuk memastikan data ESG manufaktur siap menghadapi standar global 2027, perusahaan membutuhkan auditor yang memiliki kapabilitas lebih dari sekadar

mengaudit angka keuangan. Di sinilah afiliasi KAP menjadi krusial untuk diteliti. Penggunaan jasa KAP yang berafiliasi tersebut wajib diungkapkan secara transparan oleh perusahaan dalam Laporan Tahunannya sesuai SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021. KAP berafiliasi yang memiliki akses ke standar *assurance* internasional seperti ISAE 3000 (Revised) dapat melibatkan pakar multidisiplin termasuk ahli lingkungan dan emisi gas rumah kaca untuk mengevaluasi apakah informasi non-keuangan klien bebas dari salah saji material. Kapabilitas superior inilah yang secara teoritis memberikan tekanan positif bagi perusahaan manufaktur untuk menyajikan pengungkapan ESG yang lebih komprehensif, akurat, dan siap menghadapi standar IFRS. El-Deeb et al. (2023) dan Handayati et al. (2025) membuktikan pengaruh positif afiliasi KAP Big Four terhadap kualitas pengungkapan ESG.

Selain itu, dewan komisaris independen merupakan faktor determinan yang penting dalam pengungkapan ESG. Teori keagenan Jensen & Meckling (1976) menegaskan bahwa komisaris independen sebagai pihak eksternal tanpa afiliasi dengan manajemen berperan sebagai mekanisme pengawasan yang mendorong transparansi informasi kepada pemangku kepentingan, termasuk informasi ESG. Teori sinyal Rankin et al. (2018) juga memprediksi bahwa proporsi komisaris independen yang tinggi merupakan sinyal komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik, sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap kualitas pengungkapan ESG. Mkadmi & Daafous (2025) dalam studi lintas 40 negara membuktikan bahwa proporsi komisaris independen merupakan salah satu pendorong utama peningkatan kualitas

pengungkapan ESG. Sebaliknya, Zachary & Fuad (2025) dan Pebrianti et al. (2026) menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ESG di Indonesia. Inkonsistensi ini memperkuat urgensi pengujiannya dalam konteks perusahaan manufaktur Indonesia.

Ketidakkonsistenan temuan dari berbagai penelitian terdahulu mengenai pengaruh *audit tenure*, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan afiliasi KAP terhadap pengungkapan ESG, dikombinasikan dengan minimnya penelitian yang mengintegrasikan keempat variabel tersebut secara simultan dalam satu kerangka analisis khususnya pada perusahaan manufaktur Indonesia menciptakan celah penelitian yang signifikan dan mendesak untuk diisi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan keempat variabel independen tersebut secara bersamaan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap tingkat pengungkapan ESG, dengan fokus pada periode 2022-2024 yang merupakan masa transisi krusial di mana regulasi pelaporan keberlanjutan mulai diberlakukan secara wajib di Indonesia, sehingga memungkinkan kajian yang lebih relevan dan kontekstual terhadap perilaku pengungkapan ESG yang menggunakan Standar GRI 2021 pada perusahaan manufaktur. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membuktikan secara empiris pengaruh audit tenure, ukuran perusahaan, afiliasi KAP, dan dewan komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan ESG pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pengembangan literatur determinan ESG di negara

berkembang sekaligus masukan praktis bagi manajemen perusahaan, regulator, auditor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Merujuk pada konteks penelitian yang telah diuraikan, penyusun merumuskan judul penelitian sebagai berikut: "Pengaruh *Audit Tenure*, Ukuran Perusahaan, Afiliasi KAP, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Tingkat Pengungkapan ESG Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2022–2024."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan ESG pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan ESG pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
3. Apakah Afiliasi KAP berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan ESG pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?

4. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan ESG pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan ESG pada perusahaan manufaktur tahun 2022-2024.
2. Untuk memberikan bukti empiris apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan ESG pada perusahaan manufaktur tahun 2022-2024.
3. Untuk memberikan bukti empiris apakah Afiliasi KAP berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan ESG pada perusahaan manufaktur tahun 2022-2024.
4. Untuk memberikan bukti empiris apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan ESG pada perusahaan manufaktur tahun 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi :

1. Manfaat Teoritis

a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh audit tenure, ukuran perusahaan, Dewan Komisaris Independen dan afiliasi KAP terhadap tingkat pengungkapan ESG pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

b. Menjadi referensi dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik yang berkaitan dengan pengungkapan ESG di Indonesia.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Perusahaan Manufaktur: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi manajemen dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas pengungkapan ESG. Pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan ESG diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk memperlakukan pelaporan ESG bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan sebagai strategi bisnis yang memberikan nilai tambah jangka panjang bagi perusahaan dan seluruh pemangku kepentingannya.

b. Bagi Investor dan Analis Keuangan: Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dan analis keuangan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat transparansi dan kualitas pengungkapan ESG suatu perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan tambahan dalam proses pengambilan keputusan investasi yang lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang.

c. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP): Hasil penelitian mengenai pengaruh audit tenure terhadap pengungkapan ESG dapat menjadi refleksi bagi KAP dalam mengevaluasi kebijakan rotasi auditor dan menjaga independensi serta objektivitas dalam mendorong klien untuk melakukan pengungkapan informasi non-keuangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

d. Bagi Akademisi dan Mahasiswa: Penelitian ini dapat menjadi referensi akademis yang berguna untuk pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang akuntansi, keuangan, dan manajemen, khususnya terkait dengan isu keberlanjutan perusahaan dan pengungkapan ESG di Indonesia.